

OLEH-OLEH DAPIL

PKS PARLEMEN EDISI NOVEMBER PEKAN III



PKS TETAP HADIR BERSAMA RAKYAT



Teddy Setiadi, S.Sos.

Terima Aspirasi Guru Honorer

Bandung (17/11) --- Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PKS Teddy Setiadi, menerima perwakilan Forum Guru Honorer Jawa Barat Jumat 13 November 2020 di Bandung

Dalam penyampaian aspirasinya Dwi Sulastri sebagai ketua forum menyampaikan bahwa anggota yang terkumpul dalam Forum Guru Honorer Jawa Barat ini adalah Guru Honorer yang tidak lulus passing grade pada saat tes pengangkatan K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2019 yang jumlahnya 148 Orang di Jawa Barat.

"Kuota pengangkatan PPPK di Jawa Barat 1500 Orang, Yang mendaftar dan ikut tes 935 Orang, lulus tes 695 Orang, tidak lulus 148 Orang" ujar Dwi.

"Kami sudah beberapa kali bertemu dengan Anggota DPRD Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, BKN, sampai KemenPanRB tetapi masih belum ada hasil padahal di setiap pertemuan selalu ada kabar yg menggembirakan namun setelahnya nasib kami terkatung-katung kembali," Tutur Dwi

"Alhamdulillah sejak Gubernur

Ahmad Heryawan honor kami meningkat menjadi Rp 2.040.000 yang tadinya hanya 400.000 bahkan ada yang 200.000. Sekarang kami hanya ingin dihargai, Saya sudah 26 tahun mengabdikan menjadi guru, rekan-rekan saya juga ada yang 25 tahun, 20 tahun, paling sedikit 17 tahun mengabdikan. Kami sudah tua kami hanya ingin dihargai." Jelas Dwi sambil meneteskan air mata.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A

Serap Aspirasi Dari Penggiat, Pakar Dan Aktivistis Masyarakat Lansia

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A menjadi Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia (RUU KLU). Dalam menjalankan tugasnya sebagai Panja Nur Azizah banyak menyerap aspirasi dari para penggiat, pakar dan aktivis masyarakat Lansia. Nur Azizah melakukan diskusi khusus pada Ahad (15/11) bersama Ida Murni, salah satu Aktivistis Lansia sekaligus pembina Lansia di PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat) Kota Depok. Diskusi

berlangsung hangat di kediaman Ida Murni di Kawasan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok.

Berdasarkan hasil diskusi Panjang Bersama Ida Murni, Nur Azizah mendapatkan bahwa masyarakat lansia secara umum masih belum mendapatkan prioritas khususnya saat harus menggunakan transportasi umum. Karenanya, Nur Azizah tegaskan bahwa fasilitas umum ramah lansia harus menjadi perhatian khusus dalam komponen RUU KLU. Menurut Ida Murni, meskipun di beberapa moda transportasi umum seperti Trans Jakarta dan Commuter Line sudah ada aturan khusus bagi lansia agar mendapatkan kursi prioritas, tapi hal itu tidak dibarengi dengan perlakuan prioritas yang juga harus diterima oleh masyarakat lansia.

“Seperti yang baru saja di alami teman saya di Stasiun Ul. Saat akan naik KRL dia sempat terseret kereta karena pintu kereta yang terbuka

dan tertutup secara otomatis begitu cepat menjadi kesulitan tersendiri bagi lansia, selain itu juga tidak ada pemberitahuan apa pun dari masinisnya, juga tidak adanya petugas yang menjaga di tiap pintu kereta untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu. Kondisi seperti itu sangat menyulitkan bagi lansia untuk naik KRL, meskipun saat di dalam kereta mereka mendapat kursi prioritas”, jelas Ida Murni.

Selain itu, Ida Murni juga menceritakan bahwa moda transportasi Angkutan Umum (Angkot) masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri baik bagi lansia maupun pemerintah daerah. Belum ada aturan tegas bagi moda transportasi angkot untuk memprioritaskan penumpang lansia. Masih banyak lansia yang mengandalkan moda transportasi Angkot untuk beraktivitas dan merasa kesulitan karena kerap diperlakukan tidak nyaman oleh supir Angkot



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A

Serap Aspirasi Yayasan Tuna Netra YAKTAMI

Depok – Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A kunjungi Yayasan Keluarga Tuna Netra Muslim Indonesia (YAKTAMI) di Jl. Ketapang 1 Depok Timur pada Senin (19/10). Kegiatan ini dilakukan guna serap aspirasi sekaligus untuk menjenguk Syafi'i, pengelola yayasan yang juga merupakan terapis pijat tuna netra di YAKTAMI yang menderita stroke. Pada kesempatan ini Nur Azizah melakukan diskusi bersama Syafi'i, masyarakat, serta Oha selaku ketua

RT setempat.

Syafi'i menyampaikan meskipun dirinya kini sakit stroke, dirinya tetap aktif membimbing para tuna netra terlantar di kawasan Depok agar dapat berdaya. Salah satunya dengan memberikan skill memijat. Di Yayasan ini juga ia bersama istrinya yang juga tuna netra, membuka praktik pijat yang terpisah untuk pasien laki-laki dan perempuan.

"Kalau pijat Alhamdulillah saya langsung yang pegang untuk yang

laki-laki. Untuk yang perempuan sama istri saya", jelas Syafi'i. Ia juga menambahkan dimasa Pandemi Covid-19 ini pasien yang datang ke klinik pijatnya jauh berkurang. "Mungkin banyak yang takut kena Covid, karena kita prakteknya langsung bersentuhan dengan pasien. Semoga pandemi ini segera usai, jadi orang-orang bisa tenang pijat lagi di sini", tambah Syafi'i.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A

Kunjungan Kerja Spesifik ke Bali

Denpasar (16/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, melakukan Kunjungan Kerja (kunker) Spesifik bersama 8 Delegasi Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Kesejahteraan Lanjut Usia ke Denpasar, Bali pada Rabu (11/11/2020).

Kunker dilakukan dalam rangkaian proses perombakan secara total Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

RUU tentang perubahan atas UU No. 13 tahun 1998 ini telah

masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan diusulkan oleh DPR RI sejak 17 Desember 2019.

Menurut Nur Azizah, berdasarkan hasil peninjauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 dinilai sudah tidak lagi relevan saat ini, karena masih menggunakan beberapa definisi lama yakni pada Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

"Perlu Undang-undang baru yang mampu merespon perubahan

masyarakat, serta mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI setelah tahun 1998," ungkap Nur Azizah.

Nur Azizah merujuk pada pandangan Komnas HAM terkait hak khusus yang harus menjadi prioritas dalam RUU ini yakni harus mencakup penerapan program 'Healthy Ageing' (menua dengan tetap sehat) sebagai program yang menjadi fokus WHO tentang lansia (2015-2030).



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,M.A

Gelar kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan

Depok – Anggota Komisi VIII DPR/MPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A, gelar kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) atau dikenal juga dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang ke-4 di Jember Kota Depok dan Kota Bekasi, di Rumah Peduli Nurul Fikri, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Kota Depok, pada Selasa (17/09). Kegiatan diikuti oleh 150 peserta tokoh wanita muda dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan, diantaranya 22 peserta hadir secara fisik dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan sisanya mengikuti kegiatan secara

virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan digelar untuk menguatkan pilar kebangsaan yang terdiri dari empat unsur yakni Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Nur Azizah menegaskan dalam terbentuknya keempat pilar tersebut di Indonesia tidak terlepas dari jasa-jasa para pahlawan termasuk di

dalamnya para ulama yang turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.

Nur Azizah menjelaskan bahwa di masa akhir Perang Asia Timur Raya Tahun 1945, pada tanggal 29 April 1945, dibentuk suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Terdapat tokoh-tokoh ulama yang turut berpartisipasi di dalamnya.



Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A

Gelar kegiatan Sosdapil di Kelurahan Tugu, Cimanggis

Depok – Anggota Komisi VIII DPR/MPR RI Fraksi PKS, Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A, gelar kegiatan Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) atau dikenal juga dengan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang ke-4 di Jabodetabek Kota Depok dan Kota Bekasi, di Rumah Peduli Nurul Fikri, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Kota Depok, pada Selasa (17/09). Kegiatan diikuti oleh 150 peserta tokoh wanita muda dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan, diantaranya 22 peserta hadir secara

fisik dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dan sisanya mengikuti kegiatan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting.

Kegiatan digelar untuk menguatkan pilar kebangsaan yang terdiri dari empat unsur yakni Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk

Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara. Nur Azizah menegaskan dalam terbentuknya keempat pilar tersebut di Indonesia tidak terlepas dari jasa-jasa para pahlawan termasuk di dalamnya para ulama yang turut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia.



H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

Sosialisasi UU Haji bersama Kemenag

Subang (14/11) --- Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah berusaha memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi jamaah.

"Peran kita bersama Pemerintah memastikan penyelenggaraan haji berjalan dengan baik. Sesuai amanah UU, DPR akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi perbaikan. Salah satunya perubahan dari UU Nomor 13 Tahun 2008 menjadi UU

Nomor 8 Tahun 2019 ini," terangnya.

Hal tersebut disampaikan pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Haji dan Umrah, di Subang, Sabtu (14/11) yang diselenggarakan Kanwil Kemenag Jawa Barat.

"Ada 12 poin penting perubahan dalam revisi UU Haji ini. Semua dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan dan kenyamanan yang terbaik bagi masyarakat khususnya calon jamaah haji dan umrah," papar Nurhasan.

Nurhasan juga menegaskan bahwa acara sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat supaya memahami regulasi tentang haji dan umrah secara jelas dan terbuka.

"UU akan kelihatan celah dan kekurangannya setelah diimplementasikan. Makanya, kita terus kawal implementasi UU ini, sehingga akan kita terus evaluasi pelaksanaannya, bila ada yang kurang pas kita akan segera berikan rekomendasi untuk perbaikan," tambahnya.



H. Alifudin, S.E.,M.M

Temu Konstituen di Dapil

Kayong Utara (19/11) --- Nilai Nilai persatuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila semakin relevan dijalankan saat di masa pandemi Covid-19, Penguatan nilai persatuan dalam meneken berkembangnya wabah Covid-19.

Alifudin, Anggota DPR RI menjelaskan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kayong Utara, Rabu (18/11/2020) malam.

Dalam sosialisasinya, Alifudin menjelaskan di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak yang bisa diambil sebagai panduan dalam

bermasyarakat untuk melawan covid-19.

"Peran kita sebagai warga negara, yaitu saling membantu dalam menghadapi Covid-19, karena sekarang ini dunia kesehatan kita sedang dapat ujian besar, pemerintah sudah mengeluarkan Protokol kesehatan dengan 3 M nya, dan kita harus mendukung agar penanganan Covid-19 semakin mudah," Ujarnya.

Alifudin juga menambahkan, banyaknya informasi terkait Covid-19 membuat kita harus pandai-pandai dalam menyaring informasi yang benar dan akurat agar tidak

terjadi permasalahan yang justru bertolak belakang dengan penanganan Covid-19.

"kita berharap dalam menghadapi pandemi ini, masyarakat semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan, sama-sama kita hadapi, jangan sampe malah bertikai yang disebabkan informasi-informasi hoax yang beredar," harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati KKU, Effendi Ahmad, Kades Rantau Panjang, Hasanan serta warga desa.



H. Rofik Hananto, S.E

Tinjau Proses Distribusi Bantuan Paket Konverter Kit

Siang ini (13/11), Anggota Fraksi PKS DPR RI Rofik Hananto bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Bapak Muqodam

meninjau langsung proses distribusi bantuan paket konverter kit untuk para petani sasaran di UPT Perbenihan Dinas Pertanian

Purbalingga.

Bantuan ini berbentuk konverter kit, pompa air, tabung lpg 3 kg dan isi.



Hj. Nevi Zuairina

Serahkan Alat Mesin Pertanian untuk Lima Kelompok Tani di Kabupaten Pasaman

Kabupaten Pasaman (13/11) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina menyerahkan bantuan alat mesin

pertanian kepada kelompok-kelompok tani di kabupaten Pasaman. Penyerahan ini dilakukan pada masa sidang DPR sudah mulai

berjalan, akan tetapi masih dalam sistem sidang yang dilakukan secara online.



Hj. Nevi Zuairina

Buka Pameran UMKM untuk Meriahkan MTQ Nasional di Sumbar

Padang (15/11) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS asal Sumatera Barat II, Nevi Zuairina membuka pameran UMKM dalam rangka memeriahkan

MTQ Nasional ke XXVIII di Padang. Perhatian Anggota Komisi VI DPR ini selalu tercurah pada pelaku usaha UMKM, karena tidak

dipungkiri usaha pada cluster ini merupakan penggerak perekonomian nasional yang sedapat mungkin diupayakan tidak terganggu.



DR. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H.,M.H

Sambutan Pada Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah mengungkapkan, memasuki era industri 4.0, DPR RI harus segera mewujudkan digitalisasi dokumen dan mengusung konsep paperless. Yakni dokumen-dokumen dan data-data yang memungkinkan untuk dibuat digital akan dikonversi ke dalam bentuk digital file dan disimpan ke dalam digital storage.

Mengusung konsep paperless merupakan sebuah langkah di era digital, gagasan e-parlemen

meniscayakan dalam penggunaan file digital untuk menyimpan dokumen. "Memasuki era 4.0 DPR RI harus melakukan digitalisasi. Ke depan semua harus serba digital, paperless. Kurangi kertas, dokumen menggunakan digital," ujar Dimiyati saat acara Pelatihan Kepemimpinan dalam Pengelolaan Anggaran, di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, gagasan tentang paperless harus segera diwujudkan, menurutnya ini salah

satu konsep dari turunan parlemen modern, sehingga penggunaan digital akan dimasifkan, agar mengurangi penggunaan kertas.

Karena penggunaan kertas yang berlebihan bisa mendatangkan banyak efek buruk, sehingga mendorong banyak institusi untuk go-digital. "Semua aspek bekerja harus disederhanakan, cara digital yang paling mungkin untuk mengefektifkan pekerjaan. Konsep parlemen modern, kita berharap di awal tahun depan bisa mulai terlihat," papar Indra. (eko/es)



Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Meresmikan PJU di Muncul

Dr. H. Mulyanto, M.Eng. Aleg DPR RI dari PKS untuk Dapil Banten III, meliputi Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang, yang akrab disapa Pak MUL bersama dengan warga Kelurahan Muncul, Tangsel hadir berkhidmat meresmikan 30 titik penerangan jalan umum (PJU) dari solar sel.

Ada warga yang bertanya, kok listrik tidak nyambung ke kabel PLN? Itulah keunggulan solar sel, sumbernya dari matahari langsung.

Turut membersamai Aleg DPRD Kota Tangsel Ibu Paramitha Messay, Ketua DPRa PKS Muncul akh

Santosa, Akh Adam, Akh Taufiq, Ketua RW dan Ketua DKM. Warga bergembira dan berterima kasih kepada PKS atas PJU ini.



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA

Dampingi Presiden PKS Konsolidasi Pemenangan Pilkada di Bali

Denpasar (17/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Konsolidasi Kemenangan Dakwah di

Denpasar Bali, pada Selasa 17 November 2020.

Dalam kesempatan tersebut Jazuli berpesan agar seluruh pejabat

publik PKS harus kreatif, Inovatif dan Atraktif dalam memperjuangkan kepentingan Umat dan Rakyat.



Fraksi PKS Terima Aspirasi Bupati Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur (NTT)

Jakarta (17/11) --- Fraksi PKS DPR RI Menerima Aspirasi 17 November 2020 dari Bupati Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang

peningkatan sarana sekolah dasar dan pemekaran wilayah.

Dalam kesempatan itu diterima Wakil Ketua Komisi X Dr. Abdul Fikri

Fahik, Sekretaris FPKS DPR RI Hj Ledia Hanifa Amaliah, M.PSi; dan Anggota FPKS DPR RI komisi II H. Teddy Setiady, S.Sos



Fraksi PKS Terima Aspirasi PP KAMMI

Jakarta (17/11) --- Anggota Badan
Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS Amin,
Ak menerima langsung aspirasi dari
PP KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa

Muslim Indonesia) di ruang Aspirasi
Fraksi PKS DPR RI pada Selasa 17
November 2020.
Pertemuan dalam rangka

Silaturahmi dan sharing tentang
RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. (Foto :
Sarah)





Ketua Fraksi PKS DPR Dampingi Presiden PKS Konsolidasi Pemenangan Pilkada di Bali



Denpasar, Balikpapan (17/11)

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mendampingi Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam Konsolidasi Kemenangan Dakwah di Denpasar Bali, pada Selasa 17 November 2020. Dalam kesempatan tersebut Jazuli berpesan agar seluruh pejabat publik PKS harus kreatif, Inovatif dan Atraktif dalam memperjuangkan kepentingan Umat dan Rakyat.



Bincang-bincang. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati (Kanan) berbincang-bincang di sela-sela Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis (12/11/2020) di Jakarta.



Foto Bareng Menkeu. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati foto bareng Menteri Keuangan Sri Mulyani disela-sela Rapat Kerja bersama Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis (12/11/2020) di Jakarta.

Ketahui segala informasi
terkini ikhtiar politik
PKS di Parlemen



Kunjungi
**KANAL RESMI
FRAKSI PKS DPR RI**

fraksi.pks.id



Website
fraksi.pks.id



Instagram
[fraksipksdprri](https://www.instagram.com/fraksipksdprri)



Twitter
[@fraksipksdprri](https://twitter.com/fraksipksdprri)



Facebook
Fraksi PKS DPR RI



Youtube
PKSTV DPR RI